

Model Pengembangan Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Pondok Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Song Broek , Gianyar

The Tri Hita Karana Development Model in the Management of Sustainable Tourist Lodges: A Case Study in Song Broek, Gianyar

Nyoman Surya Wijaya^{1*} & I Made Darsana²

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

*Email Correspondence: surya.wijaya@ipb-intl.ac.id

Abstract

This study aims to design a Tri Hita Karana (THK) implementation model for the sustainable management of Song Broek Tourist Lodge in Melinggih Village, Payangan District, Gianyar Regency, Bali. The study employed a qualitative case study approach to explore the implementation of the three THK dimensions: Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. Data were collected through documentation, Focus Group Discussion (FGD), interviews, and observation involving tourism and cultural experts, representatives of the Tri Hita Karana Foundation, THK Award assessors, ASITA representatives, and the lodge management. Data were analyzed using an interactive qualitative analysis consisting of data collection, reduction, presentation, and conclusion verification, supported by source and method triangulation. The findings identified 14 THK implementation indicators, consisting of four Parahyangan indicators, five Pawongan indicators, and five Palemahan indicators. The study further developed operational procedures for implementing these indicators through standard operating procedures, action plans, responsibility allocation, targets, monitoring, and evaluation. The findings demonstrate that THK can be translated from a Balinese philosophical value into an operational management framework that integrates spiritual, social, cultural, and environmental dimensions. The study concludes that the proposed THK model provides an applicable framework for strengthening sustainable management of community-based tourist accommodation.

Keywords: *Tri Hita Karana, tourist lodge, sustainable tourism, local wisdom, accommodation management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model penerapan *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan Pondok Wisata Song Broek, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sebagai upaya mendukung pengelolaan akomodasi pariwisata berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, dan observasi, dengan melibatkan akademisi, ahli budaya, Yayasan Tri Hita Karana, asesor THK Award, perwakilan ASITA, serta pengelola pondok wisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menghasilkan 14 indikator penerapan THK yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Penelitian juga menghasilkan tata cara penerapan indikator melalui penguatan kapasitas manajemen dan karyawan, penyusunan SOP dan *action plan*, pembagian tanggung jawab, penetapan target atau KPI, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Model yang dihasilkan menempatkan nilai THK sebagai landasan pengelolaan yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa THK dapat diterjemahkan dari nilai filosofis menjadi model pengelolaan pondok wisata yang lebih operasional, terukur, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Tri Hita Karana, pondok wisata, pariwisata berkelanjutan, kearifan lokal, tata kelola akomodasi*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perkembangan pariwisata berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial masyarakat. Streimikiene et al. (2021) menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu memperhatikan daya saing destinasi sekaligus dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Trišić et al. (2021) menunjukkan bahwa praktik pariwisata dan perhotelan yang berorientasi lingkungan semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan akomodasi tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Perubahan perilaku wisatawan juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan bentuk akomodasi. Shah dan Trupp (2021) menunjukkan bahwa wisatawan semakin mempertimbangkan suasana yang memberikan ketenangan, pengalaman personal, kedekatan dengan lingkungan lokal, serta suasana yang menyerupai rumah dalam memilih akomodasi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pondok wisata sebagai bentuk akomodasi yang mampu menawarkan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan budaya lokal. Di Bali, pengembangan pondok wisata berbasis kearifan lokal menjadi semakin relevan karena karakteristik akomodasi tersebut memungkinkan nilai budaya dan lingkungan lokal diintegrasikan ke dalam pengalaman wisata. Diwyarthi et al. (2025) juga menempatkan pengelolaan pondok wisata berbasis kearifan lokal sebagai bagian penting dalam pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Dalam konteks Bali, salah satu kearifan lokal yang memiliki relevansi kuat dengan pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah Tri Hita Karana (THK). THK merupakan filosofi yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*) (Pujaastawa, 2004). Ketiga unsur tersebut memberikan landasan nilai yang komprehensif karena menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan. Darmawijaya et al. (2024) menegaskan bahwa THK dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan akomodasi dengan mengintegrasikan nilai tradisi dan modernitas untuk mendukung keberlanjutan. Penerapan THK dalam pengelolaan akomodasi juga telah dikaji dalam berbagai konteks, antara lain pada hotel dan resort di Bali (Pranata et al., 2017; Pramesti, 2019; Haryono & Winasih, 2022).

Penerapan THK dalam pengelolaan akomodasi pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan keberadaan unsur budaya secara fisik, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam aktivitas pengelolaan. Pada aspek *Parahyangan*, penerapan dapat berkaitan dengan keberadaan tempat suci, penghormatan terhadap simbol dan kegiatan keagamaan, serta pemberian ruang bagi pelaksanaan aktivitas spiritual. Pada aspek *Pawongan*, penerapan berkaitan dengan hubungan antara pengelola, karyawan, wisatawan, dan masyarakat lokal. Sementara itu, aspek *Palemahan* berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan lingkungan alam. Buku Panduan THK Award 2019 yang digunakan sebagai salah satu rujukan penelitian juga memberikan dasar bagi pengembangan indikator penerapan THK dalam pengelolaan akomodasi (Wardana, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa THK memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan akomodasi dan destinasi pariwisata. Pertiwi dan Ludigdo (2013) menunjukkan pentingnya penerapan nilai THK dalam praktik pengelolaan yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pramesti (2019) mengkaji implementasi THK pada Melia Bali Villas and Spa Resort dan menunjukkan relevansinya dalam pengelolaan akomodasi pariwisata. Putra et al. (2022) juga mengkaji hubungan THK dengan pariwisata berkelanjutan pada Four Points by Sheraton Bali Kuta. Sementara itu, Putri et al. (2024) menunjukkan penerapan konsep THK dalam upaya mewujudkan hotel yang lebih ramah lingkungan. Penelitian Solihin dan Sumawidari (2021) secara khusus membahas implementasi THK dalam pengelolaan homestay tradisional Bali di Ubud. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa THK telah memiliki landasan penerapan dalam berbagai bentuk akomodasi, tetapi karakteristik pondok wisata yang lebih kecil dan berbasis masyarakat memerlukan penyesuaian indikator dan mekanisme penerapannya.

Pondok wisata memiliki karakteristik yang berbeda dengan hotel dan resort berskala besar. Pondok wisata lebih dekat dengan masyarakat lokal dan dapat memberikan pengalaman kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan, budaya, serta lingkungan masyarakat setempat (Pitana & Gayatri, 2005). Dalam perspektif pariwisata berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat lokal merupakan aspek penting agar aktivitas pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kesejahteraan masyarakat (Murphy, 1985; Raharjana, 2017). Oleh sebab itu, penerapan THK pada pondok wisata perlu mempertimbangkan karakteristik skala usaha, keterlibatan pemilik dan karyawan, hubungan dengan masyarakat adat, serta kondisi lingkungan tempat akomodasi tersebut berada.

Persoalan tersebut ditemukan pada Pondok Wisata Song Broek, yang berlokasi di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Pondok wisata ini memiliki karakteristik lingkungan yang asri dan menawarkan pengalaman wisata yang menyatu dengan alam. Namun, hasil observasi awal penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai THK belum terintegrasi secara optimal dalam pengelolaannya. Pada aspek *Parahyangan*, masih terdapat keterbatasan informasi mengenai tempat suci dan kegiatan keagamaan lokal bagi wisatawan. Pada aspek *Pawongan*, keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional masih terbatas, sementara aspek pengelolaan sumber daya manusia dan pengenalan budaya Bali kepada wisatawan masih perlu diperkuat. Pada aspek *Palemahan*, pengelolaan ruang hijau, sampah, konservasi lingkungan, dan edukasi lingkungan kepada wisatawan masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi nilai THK dengan implementasinya dalam pengelolaan pondok wisata.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan THK pada hotel, resort, vila, atau destinasi tertentu, sedangkan kajian yang secara khusus merancang indikator dan model operasional penerapan THK pada pondok wisata masih terbatas. Solihin dan Sumawidari (2021), misalnya, telah membahas implementasi THK pada homestay tradisional di Ubud, sedangkan Raharjana (2017) membahas potensi pondok wisata sebagai model pariwisata berbasis komunitas di Bali. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih operasional untuk menerjemahkan filosofi THK menjadi indikator pengelolaan yang spesifik serta prosedur yang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional pondok wisata.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merancang model penerapan Tri Hita Karana dalam pengelolaan Pondok Wisata Song Broek berkelanjutan. Penelitian secara khusus bertujuan untuk: **(1)** mengidentifikasi indikator penilaian penerapan THK dalam pengelolaan pondok wisata; **(2)** menganalisis tata cara penerapan indikator THK dalam pengelolaan akomodasi pondok wisata yang berwawasan pariwisata berkelanjutan; dan **(3)** merancang model penerapan THK pada Pondok Wisata Song Broek di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian selanjutnya diarahkan untuk menerjemahkan nilai THK menjadi model pengelolaan yang lebih operasional melalui indikator, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan pondok wisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai penerapan *Tri Hita Karana (THK)* dalam pariwisata telah dilakukan pada berbagai bentuk akomodasi dan aktivitas pariwisata di Bali. Pranata et al. (2017) meneliti penerapan konsep THK di The Trans Resort Bali dan menemukan penerapan pada tiga dimensi, yaitu program strategis pada aspek *Parahyangan*, pemberdayaan tenaga kerja lokal pada aspek *Pawongan*, serta pemuliaan flora di lingkungan hotel pada aspek *Palemahan*. Penelitian Pramesti (2019) pada Melia Bali Villas and Spa Resort juga menunjukkan bahwa konsep THK dapat diterapkan dalam pengelolaan akomodasi pariwisata melalui integrasi nilai budaya, sosial, dan lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa THK dapat digunakan sebagai landasan pengelolaan akomodasi yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan budaya dan lingkungan.

Penelitian berikutnya memperluas penerapan THK pada berbagai konteks akomodasi. Haryono dan Winasih (2022) mengkaji penerapan konsep THK di Royal Pita Maha Resort & Spa Ubud, sedangkan Putri et al. (2024) mengkaji implementasi THK dalam upaya *mewujudkan green hotel* di Mimpi Resort Menjangan, Kabupaten Buleleng. Solihin dan Sumawidari (2021) secara lebih khusus mengkaji implementasi THK pada *traditional Balinese homestays* di Ubud. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai THK dapat diterapkan pada pengelolaan akomodasi dengan mengintegrasikan nilai spiritual, hubungan sosial, budaya lokal, serta pengelolaan lingkungan. Pada konteks pariwisata yang lebih luas, Dalem et al. (2021) juga menunjukkan penerapan prinsip yang selaras dengan THK melalui evaluasi ekowisata berbasis konservasi penyu di TCEC Serangan, sedangkan Sanjaya et al. (2024) mengevaluasi pelaksanaan THK pada lingkungan vila di Kecamatan Ubud.

Selain penelitian mengenai hotel, resort, homestay, vila, dan destinasi, Raharjana (2017) menempatkan pondok wisata sebagai model pariwisata berbasis komunitas di Bali. Hal ini menjadi penting karena pondok wisata memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan hotel dan resort, terutama dalam hal kedekatan dengan masyarakat lokal, pemanfaatan lingkungan sekitar, serta keterlibatan pemilik dan masyarakat dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, penerapan THK pada pondok wisata membutuhkan penyesuaian indikator dengan karakteristik dan skala usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap*. Penelitian sebelumnya telah banyak menjelaskan penerapan atau mengevaluasi THK pada hotel, resort, homestay, vila, dan destinasi pariwisata. Namun, masih terbatas penelitian yang secara

khusus mengembangkan indikator penerapan THK untuk pondok wisata dan menerjemahkannya ke dalam model pengelolaan yang operasional. Naskah penelitian menunjukkan bahwa indikator THK yang digunakan pada akomodasi perlu disesuaikan dengan karakteristik pondok wisata melalui proses FGD sebelum digunakan sebagai dasar perancangan model.

Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan mengembangkan indikator penerapan THK yang spesifik untuk pengelolaan pondok wisata dan selanjutnya menerjemahkannya ke dalam model implementasi yang dapat diterapkan pada Pondok Wisata Song Broek. Model tersebut tidak berhenti pada identifikasi nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, tetapi diterjemahkan ke dalam SOP, *action plan*, pembagian tanggung jawab, target, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap antara konsep THK dan penerapan operasionalnya dalam pengelolaan pondok wisata berkelanjutan.

Dengan posisi tersebut, kontribusi penelitian terletak pada upaya mengubah THK dari kerangka nilai menjadi model pengelolaan yang aplikatif dan terukur bagi pondok wisata. Pendekatan ini sekaligus melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada penerapan atau evaluasi THK pada objek tertentu, dengan memberikan kerangka implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik pondok wisata berbasis masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan Tri Hita Karana (THK) dalam pengelolaan Pondok Wisata Song Broek, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada penggalian informasi, pengalaman, pandangan, dan kondisi empiris mengenai penerapan nilai-nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam pengelolaan pondok wisata. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena penerapan THK secara mendalam dalam konteks nyata pengelolaan Pondok Wisata Song Broek. Data yang dikaji berupa informasi verbal, dokumen, hasil diskusi, hasil wawancara, serta kondisi objek yang diamati di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Pondok Wisata Song Broek, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Pondok Wisata Song Broek memiliki karakteristik akomodasi yang berada dalam lingkungan masyarakat desa dan memiliki potensi penerapan nilai-nilai budaya lokal, tetapi berdasarkan pengamatan awal masih terdapat aspek-aspek THK yang belum terintegrasi secara optimal dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut menjadikan Pondok Wisata Song Broek sebagai kasus yang relevan untuk mengidentifikasi indikator THK sekaligus merancang model penerapannya dalam pengelolaan pondok wisata berkelanjutan.

Data penelitian berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pendapat dan masukan para ahli serta pihak yang terkait dengan penyusunan indikator penerapan THK, informasi mengenai penerapan THK dari pengelola pondok wisata, serta hasil pengamatan terhadap kondisi objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan, khususnya Buku Panduan THK Award 2019, artikel ilmiah, kebijakan dan peraturan tertulis, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan THK dan pengelolaan akomodasi pariwisata.

Dalam penelitian kualitatif ini, istilah populasi dan sampel tidak digunakan dalam pengertian statistik, melainkan penelitian menggunakan informan dan narasumber yang dipilih berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya terhadap fokus penelitian. Narasumber *Focus Group Discussion (FGD)* terdiri atas ahli pariwisata dari kalangan akademisi, ahli budaya dari kalangan akademisi, Ketua Yayasan Tri Hita Karana, Asesor THK Award, perwakilan ASITA, serta pengelola Pondok Wisata Song Broek. FGD tersebut digunakan terutama untuk memperoleh kesepakatan dan masukan dalam merumuskan indikator penerapan THK yang sesuai dengan karakteristik pondok wisata.

Selain FGD, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, yaitu akademisi bidang pariwisata, perwakilan Yayasan THK, dan pengelola pondok wisata. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami penerapan THK dan merumuskan strategi implementasi model. Dengan demikian, pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah yang bersifat representatif secara statistik, tetapi pada relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan terhadap tujuan penelitian.

Instrumen utama penelitian berupa panduan FGD dan panduan wawancara. Panduan FGD disusun berdasarkan indikator THK pada akomodasi yang diadopsi dan dimodifikasi dari indikator THK hotel, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan skala pondok wisata. Panduan tersebut digunakan untuk mendiskusikan indikator pada tiga elemen THK, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Sementara itu, panduan wawancara digunakan untuk menggali pendapat dan masukan para ahli mengenai strategi implementasi model serta memperoleh informasi teknis yang dapat digunakan oleh pengelola pondok wisata dalam menerapkan model THK.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi pedoman, indikator, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar penyusunan indikator THK. Dokumen utama yang digunakan adalah Buku Panduan THK Award 2019 dan artikel-artikel relevan. FGD digunakan sebagai tahap penting untuk memperoleh perspektif kolektif dari para ahli dan pemangku kepentingan dalam menetapkan indikator THK yang relevan bagi pondok wisata. Dalam pelaksanaannya, informasi hasil diskusi dicatat dan kegiatan FGD direkam dalam bentuk video.

FGD dilaksanakan pada Sabtu, 13 Desember 2025 di Green School Bali. Peserta terdiri atas ahli pariwisata, ahli budaya, Ketua Yayasan Tri Hita Karana, Asesor THK Award, perwakilan ASITA, dan pengelola Pondok Wisata Song Broek. Proses diskusi diarahkan pada identifikasi indikator penerapan THK berdasarkan tiga elemen utama, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Hasil FGD kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan indikator penerapan THK pada pengelolaan pondok wisata.

Tahapan penelitian selanjutnya dilakukan melalui wawancara untuk memperdalam informasi mengenai penerapan nilai-nilai THK serta strategi implementasi model. Wawancara dilakukan secara mendalam dan direkam untuk menjaga kelengkapan data. Informasi hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil dokumentasi dan FGD sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan penerapan THK pada Pondok Wisata Song Broek.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis dilakukan melalui empat tahapan yang berlangsung secara interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, seluruh informasi dari dokumentasi, FGD, wawancara, dan pengamatan dihimpun dan diorganisasikan sesuai fokus penelitian. Tahap reduksi dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik sehingga hubungan antartemuan dapat dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui penelusuran pola, tema, hubungan, dan makna yang muncul dari data penelitian.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari yayasan THK, akademisi atau ahli, dan pengelola pondok wisata. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui dokumentasi, FGD, dan wawancara. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai rancangan model penerapan Tri Hita Karana (THK) dalam pengelolaan Pondok Wisata Song Broek menghasilkan tiga temuan utama, yaitu: (1) teridentifikasinya indikator penerapan THK yang sesuai dengan karakteristik pondok wisata; (2) tersusunnya tata cara penerapan indikator THK dalam pengelolaan akomodasi; dan (3) terbentuknya rancangan model penerapan THK yang diterjemahkan ke dalam mekanisme pengelolaan operasional berorientasi pariwisata berkelanjutan. Temuan tersebut diperoleh melalui FGD, wawancara, dokumentasi, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THK tidak hanya relevan sebagai filosofi budaya Bali, tetapi dapat diterjemahkan menjadi instrumen pengelolaan akomodasi melalui indikator, prosedur, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Indikator Penerapan Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Pondok Wisata

Hasil FGD menghasilkan 14 indikator penerapan THK yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Empat indikator berada pada dimensi Parahyangan, lima indikator pada dimensi Pawongan, dan lima indikator pada dimensi Palemahan. Indikator tersebut merupakan adaptasi dari indikator THK pada akomodasi hotel yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha pondok wisata.

Tabel 1. Indikator Penerapan THK dalam Pengelolaan Pondok Wisata

Dimensi THK	Indikator Penerapan
Parahyangan	1. Memiliki tempat suci (Pura) 2. Larangan penggunaan simbol agama/benda sakral sebagai hiasan serta penggunaan gelar manifestasi Tuhan atau aksara suci sebagai nama kamar/bangunan

	3. Pelaksanaan kegiatan keagamaan 4. Sosialisasi THK, tempat suci, nama/geler suci, dan kegiatan keagamaan
Pawongan	5. Peraturan/kesepakatan kerja antara pemilik dan karyawan 6. Partisipasi dalam kegiatan organisasi tradisional desa 7. Pemberdayaan dan pembekalan karyawan 8. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam operasional pondok wisata 9. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan
Palemahan	10. Bangunan pondok wisata sesuai ketentuan arsitektur Bali 11. Lingkungan yang higienis dan bersih 12. Pengelolaan sampah organik dan anorganik 13. Efisiensi penggunaan air dan listrik 14. Pemeliharaan dan pengenalan tanaman/hewan asli daerah setempat

Sumber: Hasil analisis penelitian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan THK dalam pondok wisata bersifat integratif, karena ketiga dimensi tidak berdiri sendiri. Parahyangan memberikan landasan spiritual dan budaya, Pawongan mengatur hubungan sosial serta pemberdayaan manusia, sedangkan Palemahan mengarahkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Dengan demikian, THK dalam penelitian ini tidak diposisikan hanya sebagai identitas budaya, tetapi sebagai kerangka yang dapat digunakan untuk mengorganisasikan aktivitas pengelolaan pondok wisata.

Pada dimensi *Parahyangan*, empat indikator menunjukkan bahwa nilai spiritual perlu hadir dalam tata kelola akomodasi melalui keberadaan tempat suci, penghormatan terhadap simbol dan benda sakral, fasilitasi kegiatan keagamaan, serta edukasi mengenai THK kepada karyawan dan wisatawan. Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya membedakan antara pelestarian praktik keagamaan dan komersialisasi ritual. Aktivitas religius dapat memberikan pengalaman budaya bagi wisatawan, tetapi nilai spiritual tetap menjadi tujuan utama dan bukan sekadar pertunjukan wisata.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Pranata et al. (2017), Pramesti (2019), dan Haryono dan Winasih (2022) yang menunjukkan bahwa THK telah diterapkan dalam pengelolaan hotel dan resort di Bali, khususnya melalui aspek budaya, fasilitas spiritual, dan lingkungan fisik. Namun,

penelitian ini memperluas kajian tersebut pada konteks pondok wisata, yang memiliki skala usaha, karakter pengelolaan, dan hubungan dengan masyarakat lokal yang berbeda dari hotel atau resort.

Pada dimensi *Pawongan*, penelitian menghasilkan lima indikator yang menekankan hubungan harmonis antara pemilik, karyawan, masyarakat, dan wisatawan. Kesepakatan kerja, partisipasi dalam organisasi tradisional desa, pemberdayaan karyawan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta monitoring dan evaluasi pelayanan menunjukkan bahwa hubungan sosial ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola akomodasi. Salah satu temuan penting adalah bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan tenaga kerja, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan produk lokal dan keterlibatan masyarakat dalam rantai aktivitas pondok wisata.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan *Community-Based Tourism* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan dan penerimaan manfaat pariwisata (Murphy, 1985). Temuan tersebut juga memiliki kesesuaian dengan Raharjana (2017) yang melihat pondok wisata sebagai bentuk akomodasi yang memiliki hubungan erat dengan komunitas lokal. Dengan demikian, dimensi *Pawongan* dalam penelitian ini memperkuat posisi pondok wisata bukan sekadar sebagai unit bisnis akomodasi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem sosial-ekonomi desa.

Pada dimensi *Palemahan*, lima indikator yang dihasilkan mencakup kesesuaian arsitektur Bali, kebersihan, pengelolaan sampah, efisiensi air dan energi, serta pelestarian flora dan fauna lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan pada pondok wisata tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan kebersihan rutin, tetapi membutuhkan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur. Pengelolaan sampah organik dan anorganik, konservasi air, efisiensi energi, serta pemeliharaan tanaman dan fauna lokal menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola terhadap lingkungan.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Triyuni et al. (2023) yang mengaitkan kearifan lokal Bali dengan perilaku pro-lingkungan karyawan hotel serta penelitian Putri et al. (2024) mengenai penerapan THK dalam upaya mewujudkan green hotel. Penelitian Sanjaya et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya evaluasi penerapan THK pada lingkungan vila di Kecamatan Ubud. Perbedaannya, penelitian ini mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan tersebut dalam satu perangkat indikator yang secara khusus dirancang untuk pondok wisata.

Tata Cara Penerapan THK dalam Pengelolaan Pondok Wisata

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa identifikasi indikator belum cukup untuk memastikan THK benar-benar diterapkan. Indikator perlu diterjemahkan menjadi tata cara operasional yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pengelola. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Buku THK Award 2019 dapat dijadikan rujukan awal, tetapi indikator untuk hotel perlu disesuaikan dengan karakteristik pondok wisata.

Pada aspek Parahyangan, penerapan indikator diwujudkan melalui pemeliharaan tempat suci, pengaturan penggunaan simbol keagamaan, fasilitasi kegiatan keagamaan karyawan, serta sosialisasi THK kepada wisatawan dan staf. Pada aspek *Pawongan*, penerapan diwujudkan melalui perjanjian kerja, partisipasi dalam organisasi tradisional desa, pelatihan karyawan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta monitoring dan evaluasi pelayanan. Sementara itu, aspek *Palemahan*

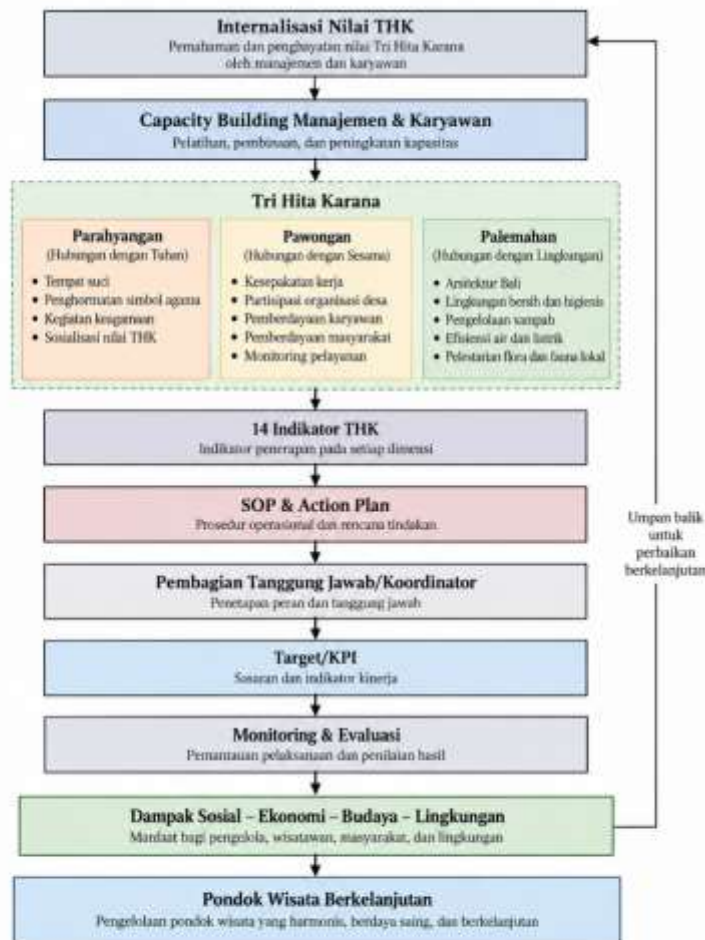
diterapkan melalui tata ruang dan arsitektur Bali, pengelolaan kebersihan, pemilahan sampah, efisiensi air dan energi, serta pelestarian flora dan fauna lokal.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari THK sebagai nilai filosofis menjadi THK sebagai sistem pengelolaan. Nilai Parahyangan tidak berhenti pada keberadaan pura, tetapi diterjemahkan menjadi aturan dan aktivitas. Pawongan tidak berhenti pada hubungan sosial, tetapi diwujudkan dalam sistem kerja dan pemberdayaan. Demikian pula Palemahan tidak berhenti pada konsep menjaga alam, tetapi diterjemahkan menjadi praktik pengelolaan sampah, energi, air, dan biodiversitas.

Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat gagasan bahwa penerapan THK membutuhkan mekanisme operasional yang memungkinkan nilai budaya diterjemahkan ke dalam perilaku organisasi. Hal ini sejalan dengan Solihin dan Sumawidari (2021) yang menunjukkan penerapan THK dalam pengelolaan homestay tradisional Bali di Ubud, tetapi penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyusun indikator dan prosedur yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan model pengelolaan.

Rancangan Model Penerapan THK dalam Pengelolaan Pondok Wisata Song Broek

Temuan paling penting penelitian adalah rancangan model yang menempatkan penguatan kapasitas internal sebagai tahap awal penerapan THK. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan THK perlu dimulai dari manajemen dan karyawan sebelum diperluas kepada masyarakat, wisatawan, dan lingkungan sekitar. Internalisasi nilai spiritual, etika, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan diharapkan berkembang menjadi budaya organisasi sehingga pelayanan tidak hanya bergantung pada instruksi pimpinan.



Gambar 4.1. Model Penerapan Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Pondok Wisata Song Broek

Model tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditempatkan sebagai hasil akhir, tetapi dibangun melalui proses manajemen yang berjenjang. Nilai THK menjadi fondasi, indikator menjadi instrumen, SOP dan action plan menjadi mekanisme implementasi, sedangkan monitoring dan evaluasi menjadi mekanisme pengendalian.

Dalam perspektif Community-Based Tourism, penguatan kapasitas internal menjadi penting karena masyarakat dan tenaga kerja lokal membutuhkan kapasitas agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengelolaan pariwisata. Dalam perspektif sustainable tourism, keberadaan SOP, pembagian tanggung jawab, target, dan evaluasi menunjukkan adanya upaya membangun tata kelola yang lebih sistematis. Dengan demikian, model yang dihasilkan menghubungkan nilai budaya lokal dengan kebutuhan manajemen akomodasi modern.

Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga tingkatan. Pertama, penelitian menghasilkan 14 indikator THK yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik pondok wisata, sehingga indikator THK tidak hanya diterapkan pada hotel, resort, atau vila. Kedua, penelitian mengintegrasikan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dengan prinsip pengelolaan pondok wisata berkelanjutan dalam satu kerangka. Ketiga, penelitian menerjemahkan nilai THK ke dalam

model implementasi yang terdiri atas SOP, action plan, struktur tanggung jawab, indikator kinerja, monitoring, dan evaluasi.

Kontribusi tersebut melengkapi penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada penerapan atau evaluasi THK pada hotel, resort, vila, homestay, dan destinasi. Pranata et al. (2017), Pramesti (2019), Haryono dan Winasih (2022), Solihin dan Sumawidari (2021), Putri et al. (2024), dan Sanjaya et al. (2024), misalnya, memberikan bukti mengenai relevansi THK dalam berbagai bentuk akomodasi dan aktivitas pariwisata. Penelitian ini memperluasnya melalui penyusunan kerangka implementasi operasional untuk pondok wisata.

Secara teoritis, penelitian menunjukkan bahwa THK dapat diposisikan sebagai local wisdom-based management framework yang menghubungkan nilai spiritual, hubungan sosial, dan pengelolaan lingkungan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Secara praktis, model dapat digunakan sebagai pedoman pengelola pondok wisata dalam mengembangkan SOP dan program kerja. Secara kelembagaan, indikator yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan, pendampingan, dan evaluasi pengelolaan pondok wisata berbasis masyarakat.

Implikasi Penelitian

Implikasi praktis penelitian terutama ditujukan kepada pengelola pondok wisata. Pengelola dapat menggunakan 14 indikator sebagai dasar untuk melakukan evaluasi internal dan menyusun prioritas perbaikan. Pada aspek Parahyangan, prioritas diarahkan pada pemeliharaan nilai spiritual dan edukasi budaya; pada aspek Pawongan pada peningkatan kualitas hubungan kerja dan pemberdayaan masyarakat; sedangkan pada aspek Palemahan pada pengelolaan sumber daya dan konservasi lingkungan.

Bagi masyarakat lokal, model memberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam operasional pondok wisata dan memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata, model dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan akomodasi berbasis masyarakat. Sementara itu, bagi pengembangan ilmu pariwisata, penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diterjemahkan ke dalam instrumen tata kelola yang lebih operasional tanpa melepaskan makna budaya yang menjadi sumber nilainya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berfokus pada satu studi kasus, yaitu Pondok Wisata Song Broek di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu, temuan penelitian terutama menggambarkan konteks pondok wisata yang menjadi objek penelitian dan belum dimaksudkan sebagai generalisasi statistik untuk seluruh pondok wisata di Bali. Selain itu, indikator yang dihasilkan merupakan hasil adaptasi indikator THK pada akomodasi yang disesuaikan melalui proses FGD dengan karakteristik pondok wisata. Pengujian penerapan indikator pada berbagai pondok wisata dengan karakteristik wilayah dan skala usaha yang berbeda masih diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Rancangan Model Penerapan Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Pondok Wisata Song Broek Berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa penerapan

konsep Tri Hita Karana (THK) relevan sebagai landasan pengelolaan pondok wisata yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian menghasilkan 14 indikator penerapan THK yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi praktik pengelolaan pondok wisata yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan THK di Pondok Wisata Song Broek pada dasarnya telah berlangsung dalam berbagai praktik pengelolaan, tetapi sebagian masih bersifat informal, berbasis pengalaman, dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem manajemen yang baku. Oleh karena itu, internalisasi nilai THK perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas manajemen dan karyawan sehingga nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan tidak hanya menjadi konsep filosofis, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi dan perilaku kerja sehari-hari.

Temuan utama penelitian selanjutnya menghasilkan model penerapan THK yang bersifat operasional dan aplikatif. Model tersebut dimulai dari internalisasi nilai THK dan *capacity building*, kemudian diterjemahkan ke dalam 14 indikator, SOP dan *action plan*, pembagian tanggung jawab atau koordinator, penetapan target/KPI, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Rangkaian tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mendukung terwujudnya pondok wisata berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menghasilkan suatu model yang menjembatani nilai filosofis THK dengan kebutuhan praktis pengelolaan akomodasi pariwisata.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan pondok wisata tidak hanya ditentukan oleh pencapaian ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pengelola membangun harmoni hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan secara terintegrasi. Model yang dirancang menempatkan penguatan kapasitas internal sebagai titik awal dan sistem manajemen sebagai instrumen untuk memastikan nilai THK dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model ini melalui pengujian pada beberapa pondok wisata di wilayah Gianyar maupun daerah lain di Bali untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan konsistensi penerapan 14 indikator THK pada karakteristik akomodasi yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menguji hubungan antara tingkat penerapan THK dengan kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, kinerja usaha, pemberdayaan masyarakat, serta kinerja lingkungan. Selain itu, diperlukan penelitian longitudinal untuk melihat efektivitas penerapan SOP, KPI, monitoring, dan evaluasi dalam jangka panjang sehingga model THK dapat terus disempurnakan dan dikembangkan sebagai model tata kelola pondok wisata berbasis kearifan lokal dan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/09669589309514792>
- Dalem, A. A. G. R., Antara, M., Wiranatha, A. S., & Paturusi, S. A. (2021). Evaluation of implementation of turtle-based ecotourism that is in line with the Tri Hita Karana at TCEC Serangan, Bali. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 9(2), 10–19.

- Darmawijaya, I. G., Kanten, I. K., & Puja, I. B. P. (2024). *Budaya lokal dalam pengelolaan hotel berkelanjutan: Merajut harmonisasi tradisi dan modernitas*. Politeknik Pariwisata Bali.
- Diwyarthi, N. D. M. S., Jata, I. W., Wiarta, N. G. M., & Pratama, I. W. A. (2025). Sosialisasi pengelolaan pondok wisata berbasis kearifan lokal. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(2), 276–286.
- Haryono, T. N. W., & Winasih, S. S. Y. (2022). Penerapan konsep Tri Hita Karana di Royal Pita Maha Resort & Spa di Ubud-Bali. *Widyastana: Jurnal Mahasiswa Arsitektur*, 3(2). <https://doi.org/10.33005/widyastana.v3i2.99>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Routledge.
- Pertiwi, I. D. A. E., & Ludigdo, U. (2013). Implementasi corporate social responsibility berlandaskan budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 430–455.
- Pitana, I. G., & Gayatri, D. (2005). Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali: Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(1), 45–56.
- Pramesti, D. S. (2019). Implementasi konsep Tri Hita Karana pada akomodasi pariwisata di Nusa Dua, Bali (Studi kasus: Melia Bali Villas and Spa Resort). *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 1(1), 211–232.
- Pranata, K. A., Sri, A. A. P., & Putra, A. M. (2017). Penerapan konsep Tri Hita Karana di The Trans Resort Bali. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas*, 1(1), 9–16.
- Pujaastawa, I. B. G. (2004). Tri Hita Karana: Kearifan lokal dengan nilai-nilai universal. Dalam Tim PUPAR UGM (Ed.), *Wawasan budaya untuk pembangunan: Menoleh kearifan lokal*. Pilar Politika Kelompok Pilar Media.
- Putra, S. P. B. P., Susanto, B., Sari, I., & Putra, G. A. M. K. K. (2022). *The connection between Tri Hita Karana and sustainable tourism at Four Points by Sheraton Bali Kuta*. Repositori Politeknik Negeri Bali.
- Putri, I. A. K., Arini, N. N., & Putra, I. N. S. A. (2024). Implementasi konsep Tri Hita Karana dalam upaya mewujudkan green hotel di Mimpi Resort Menjangan Kabupaten Buleleng, Bali. *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies*, 4(1), 139–151.
- Raharjana, I. G. (2017). Pondok wisata sebagai model pariwisata berbasis komunitas di Bali. *Jurnal Ilmu Pariwisata Indonesia*, 5(1), 23–30.
- Sanjaya, I. W. A. R., Wiranatha, A. S., & Sukewijaya, I. M. (2024). Evaluasi pelaksanaan Tri Hita Karana pada lingkungan vila di Kecamatan Ubud. *ECOTROPHIC*, 18(1), 33–44.
- Shah, C., & Trupp, A. (2021). Trends in consumer behaviour and accommodation choice: Perspectives from India. Dalam *Tourism in India* (pp. 68–83). Routledge.
- Solihin, S., & Sumawidari, I. A. K. (2021). Tri Hita Karana implementation in accommodation management: The case of traditional Balinese homestays in Ubud. *International Journal of Glocal Tourism*, 2(3), 146–159.
- Streimikienė, D., Svagzdienė, B., Jasinskis, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. *Sustainable Development*, 29(1), 259–271.
- Trišić, I., Štetić, S., Privitera, D., Petrović, M. D., Maksin, M., Vujović, S., ... & Kalinić, M. (2021). Perspectives on sustainable tourism development in the hotel industry—A case study from southern Europe. *Sustainability*, 13(10), 5563.
- Triyuni, N. N., Nadra, N., Susyarsini, N. P. W. A., Sukmawati, N. M. R., & Ginaya, G. (2023). Developing a conceptual model of hotel employees' pro-environmental behavior based on the local genius of Bali. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(1), 233–246.

- Wardana, I. G. N. W. (2019). *Buku panduan THK Award & Accreditation Tahun 2019*. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali & Yayasan Tri Hita Karana Bali.